

BAB II

DINASTI POLITIK DALAM REPRESENTASI SAMPUL MAJALAH

Bab ini akan membahas gambaran perkembangan politik dinasti di Indonesia, faktor-faktor yang mendorong kemunculannya, hingga dampaknya terhadap sistem demokrasi dan pemerintahan. Politik dinasti, yang ditandai dengan pewarisan kekuasaan dalam lingkup keluarga, semakin menguat seiring dengan lemahnya regulasi dan tingginya pengaruh elite politik. Di sisi lain, *Tempo* sebagai media yang kritis memainkan peran penting dalam mengungkap dan mengkritisi fenomena ini melalui laporan investigative serta sampul majalah yang sarat akan simbolisme. Dengan pendekatan jurnalistik yang tajam, *Tempo* tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga membangun narasi yang mendorong keasadaran publik mengenai dampak politik dinasti terhadap transparansi, akuntabilitas, serta kualitas demokrasi di Indonesia.

2.1. Dinasti Politik

Dinasti politik merupakan bentuk kekuasaan politik yang diwariskan di dalam satu lingkaran keluarga, mirip dengan sistem kerajaan di mana kekuasaan berpindah dari ayah ke anak. Dinasti politik ini cenderung mempertahankan kekuasaan dalam sebuah keluarga, sehingga mengabaikan prinsip meritokrasi atau prestasi dalam seleksi pemimpin. Ini menyebabkan kekuasaan tetap terpusat pada kelompok tertentu, sehingga proses regenerasi politik menjadi terbatas hanya pada hubungan kekerabatan. Akibatnya, sistem demokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu menjadi tidak berjalan dengan optimal.

Dinasti politik merupakan bentuk reproduksi kekuasaan yang bersifat primitif karena bergantung pada hubungan darah dan keturunan dari kelompok tertentu. Pada sistem ini, kepentingan publik sering kali diabaikan. Keberadaan politik dinasti melemahkan demokrasi karena berupaya mempertahankan kekuasaan dalam lingkup kelompok atau keluarga tertentu. Oleh karena itu, dinasti politik bertentangan dengan prinsip demokrasi yang substansial. Dengan demikian, politik dinasti menjadi salah satu penghalang dalam mewujudkan sistem politik yang benar-benar demokratis (Pasan, 2018).

Querubin (2010), menjelaskan pandangannya mengenai dinasti politik pada intinya mengarah kepada keluarga yang anggotanya memegang kekuasaan politik formal lebih dari satu generasi. Artinya, dinasti politik ini akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya agar tidak lepas dari lingkungan keluarga atau kerabatnya. Politik dinasti yang kini menjadi istilah populer, merujuk pada upaya seorang pemimpin yang terpilih melalui pemilihan umum, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga atau kerabatnya dalam posisi strategis dalam pemerintahan. Hal ini dilakukan agar mereka dapat menjadi penerus kepemimpinan di periode berikutnya atau menggantikan posisi yang tengah dijabat. Fenomena ini mencerminkan strategi penguatan jaringan kekuasaan dalam lingkup keluarga, sehingga peran dan pengaruh mereka dalam pemerintahan tetap terjaga (Dedi, 2022).

Menurut Mosca (dalam Heryanto, 2019), kemunculan dinasti politik disebabkan oleh kecenderungan elite politik untuk mewariskan kekuasaan kepada generasi berikutnya. Pewarisan ini dimungkinkan oleh sifat terbuka dari posisi

politik yang tersedia. Sementara itu, Stephen Hess dalam (Heryanto, 2019), menambahkan bahwa kelangsungan atau berhentinya sebuah politik dinasti bergantung pada langkah yang diambil oleh generasi penerus. Keberlanjutan ini memberikan keuntungan bagi keluarga politik untuk mempertahankan serta memperluas pengaruh mereka dalam pemerintahan.

Dinasti politik dapat bertahan berbagai faktor, seperti tradisi budaya, warisan, politik, atau bahkan kebijakan hukum yang memungkinkan alih kekuasaan dalam lingkup keluarga tertentu. Sistem ini tidak didasarkan pada prinsip kompetensi atau meritokrasi (Hidayat, 2014). Meski dinasti politik dapat memberikan stabilitas jangka panjang karena pemimpin baru telah tumbuh dalam lingkungan politik dan memiliki pengalaman dalam pemerintahan, sistem ini juga menimbulkan berbagai permasalahan. Konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga atau kelompok berisiko memicu praktik nepotisme, korupsi, serta ketidakadilan dalam tata kelola pemerintahan. Dinasti politik semakin memperkuat jejaring kekuasaannya, sehingga mampu mengendalikan partai politik dan melemahkan prinsip-prinsip demokrasi. Di tingkat masyarakat, upaya mempertahankan status quo juga sering dilakukan dengan mendorong anggota keluarga atau orang dekat kepala daerah untuk menggantikan petahana (Martien, 2017). Selain itu, jejaring familisme turut berperan dalam dinamika politik dengan memengaruhi pengambilan keputusan dalam pemerintahan (Risya, 2024).

Praktik dinasti politik di Indonesia sering kali terlihat dalam pemilu atau pilkada, di mana anggota keluarga dari elite politik berusaha mempertahankan atau memperluas kekuasaan mereka melalui jalur elektoral. Fenomena ini terjadi baik di

tingkat nasional maupun daerah, dengan anak, istri, suami, atau kerabat dekat pejabat maju sebagai calon dalam kontestasi politik. Seperti yang terjadi pada pilkada pada tahun 2020 terlihat beberapa keluarga dan kerabat dari pejabat pemerintah mengikuti kontestasi pada pilkada tersebut diantaranya “putra sulung dari Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming sebagai calon walikota Solo, menantu Jokowi yakni Bobby Nasution calon walikota Medan, Di sisi lain, putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, juga maju sebagai bakal calon wali kota Tangerang Selatan. Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Saraswati Djojohadikusumo, mencalonkan diri sebagai wakil wali kota di daerah yang sama. Selain itu, Hanindito Himawan Pramono, putra dari Pramono Anung, bersiap untuk mengikuti Pilkada di Kediri” (dilansir dari *VOAIndonesia* 06/03/2025).

Selain itu pada tingkat legislatif juga tidak sedikit ditemukan terjadi dinasti politik antara keluarga pejabat yang mengikut kontestasi dalam pemilihan umum. Menurut laporan *Kompas.id*, hasil penelitian dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengungkapkan bahwa setidaknya 79 dari 580 anggota DPR terpilih untuk periode 2024-2029 memiliki keterkaitan dengan dinasti politik atau hubungan kekerabatan dengan pejabat lain (dilansir dari *Kompas.com* 06/03/2025). Hal ini mencerminkan bahwa dinasti politik di Indonesia menjadi hal yang lumrah terjadi.

Dalam berbagai organisasi maupun partai politik, praktik dinasti politik kerap terjadi, dimana posisi strategis diberikan kepada anggota keluarga tertentu, bukan semata berdasarkan kompetensi, tetapi karena faktor kekerabatan. Hal ini

sering terlihat dalam pengangkatan jabatan penting, seperti sekjen, bendahara, atau bahkan ketua umum yang diwariskan kepada anak, saudara, atau kerabat dekat pemimpin sebelumnya. Seperti beberapa partai yang ada di Indonesia terlihat bahwa didalam partai tidak lepas dari keterlibatan keluarga didalamnya, partai Demokrat adalah salah satu partai yang terlihat dari struktur kepengurusannya melakukan praktik politik dinasti seperti Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dewan Pembina, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum, dan Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai wakil ketua umum (dilansir dari *SWAOnline* 11/03/2025). Partai PDIP juga melakukan hal yang sama dengan beberapa keluarganya berada dalam struktur partai tersebut dimana Megawati sebagai ketua umum, sedangkan anaknya Puan Maharani sebagai ketua bidang politik dan keamanan, Prananda Prabowo sebagai ketua bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital (dilansir dari *detiknews* 11/03/2025). Begitupun Partai Perindo, yang didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo, mengalami pergantian kepemimpinan setelah Hary mengundurkan diri dari jabatan ketua umum yang telah diembannya sejak tahun 2015 (dilansir dari *CNNIndonesia* 11/03/2025).

Bahaya dari dinasti politik adalah dampak buruknya terhadap tata kelola daerah dan negara. Jika dinasti politik terus berkembang, proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik akan terhambat. Hal ini akan berujung pada munculnya praktik korupsi, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, pendapatan daerah, dan penggunaan anggaran negara. Selain itu, meningkatnya kekuasaan dinasti di berbagai daerah bisa memperburuk kualitas pemerintahan, merugikan masyarakat, dan melemahkan sistem demokrasi.

2.2. Majalah *Tempo*

2.2.1. Sejarah *Tempo*

Majalah *Tempo* dikenal sebagai salah satu media yang secara konsisten mengangkat isu-isu penting dalam politik Indonesia, termasuk fenomena politik dinasti. Sebagai media yang sering kali menggunakan sampulnya untuk menyampaikan kritik sosial dan politik, *Tempo* telah menyoroti berbagai kasus politik dinasti di Indonesia. Melalui investigasi mendalam dan laporan kritis, *Tempo* kerap mengungkapkan bagaimana kekuasaan dalam keluarga tertentu diwariskan dan dimanfaatkan untuk memperkuat posisi politik mereka. Liputan semacam ini tidak hanya menyoroti praktik-praktik yang tidak sehat dalam demokrasi, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap dampaknya (Aisyah, et al., 2024).

Dalam pemberitaan mengenai politik dinasti, *Tempo* berusaha memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dinasti politik dapat mempengaruhi kebijakan dan jalannya pemerintahan di Indonesia. Dengan mengangkat kisah-kisah dari berbagai daerah, *Tempo* menunjukkan bahwa fenomena ini bukan hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di level daerah. Lewat laporan dan editorialnya, majalah ini menempatkan politik dinasti sebagai salah satu ancaman terhadap demokrasi yang sehat, mendorong adanya reformasi untuk memastikan pemerintahan yang lebih adil dan terbuka bagi semua.

Majalah *Tempo* didirikan pada tahun 1971, setelah melalui serangkaian perundingan antara enam wartawan ternama Goenawan Mohamad, Harjoko Trisnadi, Fikri Jufri, Lukman Setiawan, Usamah, dan Christianto Wibisono dengan

Ciputra, pendiri Yayasan Jaya Raya, serta Eric Samola, yang saat itu menjabat sebagai sekretaris yayasan. Perundingan awal berlangsung di kantor Ciputra di kawasan Proyek Senen, dan berlanjut hingga malam hari di kediamannya di Slipi, Jakarta Barat. Hasil pertemuan ini menyepakati pembentukan majalah *Tempo* dengan dukungan modal dari Yayasan Jaya Raya (dilansir dari *Tempo* 16/02/2025).

Nama "*Tempo*" dipilih dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, namanya singkat dan mudah diucapkan oleh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang. Kedua, "*Tempo*" terdengar netral dan tidak memancing kontroversi. Ketiga, nama ini tidak mengidentifikasikan simbol golongan tertentu, sehingga lebih inklusif. Keempat, arti kata "*Tempo*" yang berkaitan dengan waktu memiliki makna sederhana dan sudah lazim digunakan oleh berbagai penerbitan jurnalistik di seluruh dunia.

Majalah *Tempo* dikenal sebagai salah satu media yang secara konsisten mengangkat isu-isu penting dalam politik Indonesia, termasuk fenomena politik dinasti. Sebagai media yang sering kali menggunakan sampulnya untuk menyampaikan kritik sosial dan politik, *Tempo* telah menyoroti berbagai kasus politik dinasti di Indonesia. Melalui investigasi mendalam dan laporan kritis, *Tempo* kerap mengungkapkan bagaimana kekuasaan dalam keluarga tertentu diwariskan dan dimanfaatkan untuk memperkuat posisi politik mereka. Liputan semacam ini tidak hanya menyoroti praktik-praktik yang tidak sehat dalam demokrasi, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap dampaknya.

Dalam pemberitaan mengenai politik dinasti, *Tempo* berusaha memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dinasti politik dapat mempengaruhi kebijakan dan jalannya pemerintahan di Indonesia. Dengan mengangkat kisah-kisah dari berbagai daerah, *Tempo* menunjukkan bahwa fenomena ini bukan hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di level daerah. Lewat laporan dan editorialnya, majalah ini menempatkan politik dinasti sebagai salah satu ancaman terhadap demokrasi yang sehat, mendorong adanya reformasi untuk memastikan pemerintahan yang lebih adil dan terbuka bagi semua.

2.2.2. Karakteristik Majalah *Tempo*

Karakteristik pada majalah *Tempo* mempunyai ciri khasnya tersendiri. Media ini mempunyai keunikan yang menjadi daya tarik kuat bagi pembaca. Dengan mempertahankan reputasinya, media ini merupakan salah satu media cetak terkemuka di Indonesia yang dikenal dengan jurnalisme.

Menurut Harymurti (2007) dalam (Cahyadi, 2024) Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari majalah *Tempo*:

- a. Jurnalisme Investigatif – *Tempo* terkenal dengan pendekatan jurnalistiknya yang mendalam dan investigatif. Mereka sering menggali isu-isu penting yang jarang diangkat oleh media lain.
- b. Independensi – Majalah ini menjaga independensinya dengan tidak terikat pada kepentingan politik atau bisnis tertentu, sehingga dapat mempertahankan integritas jurnalistiknya.

- c. Gaya Penulisan – Gaya penulisan *Tempo* cenderung tajam, analitis, dan komprehensif. Artikel yang diterbitkan biasanya panjang serta menyajikan informasi yang mendalam mengenai suatu isu.
- d. Desain dan Format – *Tempo* memiliki tampilan yang khas dengan tata letak yang rapi dan profesional. Sampul majalahnya sering menampilkan gambar atau ilustrasi mencolok untuk menarik perhatian pembaca.
- e. Isu Sosial dan Politik – Majalah ini kerap mengulas isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang tengah menjadi sorotan di Indonesia. Mereka juga tidak ragu mengangkat topik kontroversial dengan sudut pandang yang beragam.
- f. Fokus pada Fakta dan Bukti – Dalam setiap laporannya, *Tempo* selalu mengutamakan keakuratan dengan menyajikan fakta dan bukti yang kuat, sehingga informasi yang diberikan dapat dipercaya.

2.2.3. Historical situadness Media *Tempo*

Industri media massa di Indonesia tidak lepas dari pengaruh kapitalisme, sebuah sistem ekonomi yang menekankan pada kepemilikan swasta, akumulasi keuntungan, dan kontrol pasar. Dalam konteks ini, media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai komoditas dan institusi ideologis yang tunduk pada logika pasar. Media seperti *Tempo*, meskipun memiliki sejarah sebagai media kritis dan independen, tetap beroperasi dalam kerangka kapitalisme media. Artinya, mereka harus mempertimbangkan aspek-aspek komersial seperti sirkulasi, iklan, dan loyalitas audiens untuk mempertahankan eksistensinya. Seperti yang dikemukakan Vincent Mosco (2009), media berada dalam pusaran

konsentrasi kepemilikan, komodifikasi isi, dan integrasi vertikal-horisontal yang membuatnya tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan ekonomi dan politik (Mosco, 2009).

Majalah *Tempo* sejak awal berdirinya pada tahun 1971 telah memainkan peran signifikan dalam sejarah pers Indonesia, dikenal sebagai media yang mengedepankan jurnalisme investigatif dan sikap kritis terhadap kekuasaan. Namun, dalam perkembangan historisnya, terutama sejak era Reformasi dan liberalisasi media pasca-1998, *Tempo* tidak hanya menjadi institusi jurnalistik, tetapi juga bagian dari industri media yang berorientasi pada logika kapitalisme. Hal ini terlihat dari bentuk kelembagaan *Tempo* sebagai perusahaan terbuka (*Tbk*), yakni PT Tempo Inti Media Tbk, yang beroperasi di bawah prinsip-prinsip manajemen modern, efisiensi, dan pertumbuhan laba karakteristik utama dari media kapitalis (dilansir dari *Tempo Media Group* 05/06/2025).

Kapitalisme media dalam konteks *Tempo* terlihat dalam cara majalah ini membingkai isu-isu politik, termasuk isu dinasti politik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sampul majalah yang secara visual dan simbolik menyoroti keterlibatan keluarga Jokowi dalam Pemilu 2024 merupakan bentuk representasi yang tidak hanya bertujuan untuk menginformasikan, tetapi juga menarik perhatian publik dan memicu respons emosional. Ini sesuai dengan pandangan Noam Chomsky dan Edward S. Herman dalam *Manufacturing Consent* (1988) yang menyatakan bahwa media, meskipun tampak independen, sering kali mereproduksi ideologi dominan untuk menyesuaikan diri dengan kepentingan ekonomi dan politik.

Namun demikian, *Tempo* juga dikenal sebagai media yang mempertahankan fungsi watchdog dalam sistem demokrasi. Kritik terhadap dinasti politik Jokowi pada berbagai sampulnya tidak hanya mencerminkan strategi kapitalis untuk menarik perhatian pembaca, tetapi juga konsistensi editorial dalam menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan meritokrasi. Dalam hal ini, *Tempo* dapat dilihat sebagai media yang bergerak dalam kontradiksi kapitalisme media di satu sisi tunduk pada tuntutan pasar, namun di sisi lain tetap menjaga idealisme jurnalistiknya. Sebagaimana ditegaskan oleh McChesney (2008), media progresif dalam sistem kapitalis memiliki ruang sempit namun tetap dapat memainkan peran kritis jika mampu mempertahankan otonomi redaksional.

Isu dinasti politik Jokowi menjadi titik temu antara kepentingan kapitalistik media dan misi ideologisnya. *Tempo*, melalui sampul-sampul edisinya sepanjang tahun politik 2023–2024, berhasil mengonstruksi wacana bahwa keterlibatan Gibran Rakabuming dan keluarga Jokowi dalam kontestasi politik bukan sekadar fenomena elektoral biasa, tetapi bagian dari persoalan struktural dalam demokrasi Indonesia. Narasi tersebut memperkuat posisi *Tempo* sebagai media yang tidak segan mengkritik kekuasaan, namun tetap dalam kerangka yang komersial. Dengan demikian, isu dinasti politik Jokowi bukan hanya dijadikan objek liputan, tetapi juga alat produksi nilai dan legitimasi media dalam sistem kapitalisme informasi.

Laporan kinerja 2024-2025 menunjukkan bahwa *Tempo* kini tidak hanya bergantung pada pendapatan iklan dan penjualan majalah, tetapi juga melakukan diversifikasi melalui lini bisnis digital seperti *TV Tempo*, *Tempo Institute*, dan *Tempo Data Science*. Pendapatan dari sirkulasi digital tumbuh 43 persen dan cetak

tumbuh 13 persen selama 2024, menandakan keberhasilan transformasi digital Tempo dalam menghadapi perubahan perilaku audiens media. Strategi ini menempatkan Tempo sebagai bagian dari sistem media neoliberal yang menekankan efisiensi, inovasi teknologi, dan profitabilitas. Transformasi ini juga mencakup penggunaan teknologi kecerdasan buatan, text-to-voice, serta kolaborasi dengan lembaga internasional seperti International Fund for Public Interest Media (IFPIM), yang semuanya menjadi bagian dari upaya mempertahankan daya saing dalam pasar media global.

Sepanjang tahun 2024, PT Tempo Inti Media Tbk (TMPO) mencatat pertumbuhan pendapatan yang signifikan sebesar 17,07 persen, mencapai Rp 253,78 miliar dari sebelumnya Rp 216,76 miliar pada 2023, dengan laba bersih meningkat 44,37 persen menjadi Rp 2,18 miliar. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan pendapatan dari sirkulasi digital dan cetak produk jurnalistik, yang secara bersamaan mengalami kenaikan meskipun tren industri menunjukkan penurunan pada media cetak. Pendapatan juga meningkat signifikan pada lini bisnis digital seperti TV Tempo, jasa rumah kreatif, dan barang cetakan. Namun, terdapat penurunan pada beberapa lini, termasuk penyelenggara acara, koran dan iklan koran, serta divisi sewa dan kertas. Keberhasilan ini dikaitkan dengan mutu jurnalisme yang tetap terjaga dan dukungan pembaca, sebagaimana disampaikan Direktur Utama Arif Zulkifli dalam RUPST 2025 (dilansir dari *Bimakini.com* 10/06/2025). Direktur Utama Arif Zulkifli menilai pertumbuhan ini sebagai bukti apresiasi pembaca terhadap mutu jurnalisme *Tempo*, yang tetap kritis terhadap pemerintah namun mendapat dukungan kuat dari pelanggan. Model

"*single brand*" yang menyatukan platform Majalah, Koran, dan *Tempo.co* sejak 17 November 2024 turut memperkuat performa ini. Tren positif tersebut berlanjut pada triwulan I 2025, dengan pendapatan digital kembali tumbuh 32 persen, meskipun sirkulasi cetak tercatat stagnan.

Namun, keberhasilan finansial dan ekspansi bisnis *Tempo* tetap dijalankan berdampingan dengan klaim komitmen terhadap jurnalisme kritis. Dalam perspektif ekonomi politik media (Mosco, 2009), *Tempo* berada dalam kontradiksi internal antara peran normatif sebagai *clearing house of information* dengan praktik ekonomi yang tunduk pada logika akumulasi kapital. Meski tetap menjaga independensi editorial, *Tempo* tetap harus menarik pembaca dan investor, sehingga produksi konten, termasuk dalam representasi isu seperti politik dinasti Jokowi, juga tidak lepas dari strategi pasar untuk membangun brand, meningkatkan *traffic digital*, dan mempertahankan langganan. Dengan demikian, keberhasilan *Tempo* dalam meningkatkan pendapatan juga merefleksikan keberhasilannya dalam mengkapitalisasi nilai-nilai jurnalisme kritis sebagai komoditas simbolik yang laku di pasar.